



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM PEMBANGUNAN INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA

Akhif Arrohman Sagi¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan Purwakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Grand theory yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas sehingga pemahaman mengenai IPAL Komunal rendah. Pada aspek sumber daya, terdapat keterbatasan tenaga teknis dan sarana pendukung yang menghambat operasional kebijakan. Pada aspek disposisi pelaksana, dukungan pemerintah daerah sudah ada, namun belum sepenuhnya didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas IPAL. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian peran antarinstansi belum jelas sehingga koordinasi sering terhambat. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta kejelasan struktur birokrasi. Diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas teknis, pembagian peran yang lebih jelas, dan evaluasi berkelanjutan agar pengelolaan limbah domestik di Kecamatan Purwakarta dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Air Limbah Domestik, IPAL Komunal.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the local government policy of Purwakarta Regency regarding domestic wastewater management through the development of Communal Wastewater Treatment Plants (IPAL Komunal) in Purwakarta District. This research employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. The grand theory used is George C. Edwards III's Policy Implementation Theory, which highlights four key

variables: communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the policy has not been fully effective. In terms of communication, the dissemination of information to the community remains limited, resulting in low public understanding of the function and importance of communal wastewater treatment facilities. Regarding resources, the program faces constraints in technical personnel and supporting infrastructure. In the disposition aspect, although local government commitment is evident, community participation in maintaining and utilizing the facilities remains insufficient. Meanwhile, the bureaucratic structure shows unclear division of roles among agencies, leading to weak coordination and delayed implementation. The study concludes that policy implementation effectiveness depends heavily on clear communication strategies, adequate resources, implementers' commitment, and a well-structured bureaucratic framework. Strengthening public outreach, increasing technical capacity, clarifying institutional roles, and enhancing continuous evaluation are needed to optimize domestic wastewater management in Purwakarta District.

Keywords: *Policy Implementation, Domestic Wastewater, Communal Wastewater Treatment.*

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan air limbah domestik merupakan isu krusial dalam pembangunan daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan aktivitas rumah tangga, volume air limbah domestik yang dihasilkan masyarakat terus meningkat dan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup apabila tidak dikelola secara memadai. Menurut Armando (dalam Mulia, 2015), limbah merupakan sisa aktivitas manusia maupun proses alam yang keberadaannya dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak ditangani secara sistematis. Oleh karena itu, pengelolaan air limbah domestik menjadi bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah memiliki peran strategis dalam merespons permasalahan lingkungan melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Keban dalam (Kadji, 2015), tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai proses dan kerangka kerja yang mengarahkan tindakan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan

pada tahap perumusan, tetapi sangat bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan Purwakarta. IPAL komunal dipandang sebagai solusi sanitasi berbasis kawasan yang efektif untuk wilayah padat penduduk yang tidak memungkinkan penerapan sistem individual (Mulia, 2015).

Namun, berdasarkan kondisi empiris di Kecamatan Purwakarta, implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik belum menunjukkan hasil yang optimal. Pengelolaan air limbah domestik memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Permasalahan limbah domestik ini harus menjadi perhatian khusus demi terciptanya kesehatan dan kualitas air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Purwakarta khususnya. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah domestik. Mengurangi dampak buruk untuk limbah domestik terhadap lingkungan, sebaiknya limbah domestik dipilah dan diolah sesuai jenisnya. Beberapa jenis limbah dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali, seperti kertas, kaca, dan plastik. Sementara itu, limbah organik dapat diolah menjadi kompos dan digunakan sebagai pupuk tanaman. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pengelolaan limbah domestik yang baik tidak hanya dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mengurangi risiko terkena penyakit dan meningkatkan ketersediaan kualitas air yang bersih dan layak dipakai oleh sesuai kebutuhan kehidupan manusia.

Salah satu program pemerintah daerah Purwakarta dalam menangani limbah domestik adalah dengan melakukan pembuatan (IPAL) Instansi Pembuangan Air Limbah Domestik Komunal. Komunal merupakan tempat pembuangan terpusat yang di peruntukan untuk mengumpulkan limbah

domestik yang dihasilkan dari sampah pemukiman warga serta limbah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dalam aktivitas sehari-hari. Komunikasi dalam rangka pengelolaan limbah domestik tersebut belum merata dalam penyampaian pesan informasi kebijakan tersebut. Pembuatan IPAL komunal yang sudah di jalankan seperti yang sudah dijelaskan dalam berita menurut laman (narwasisinfo.com) yang dilansir ada tanggal 3 November 2018 di kecamatan Purwakarta itu sendiri baru terealisasi di dua desa yaitu Desa Sindang Kasih dan Desa Munjul Jaya.

Pembangunan IPAL komunal belum merata antar desa, sementara pencemaran sungai masih berada pada kategori cemar ringan hingga sedang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (2021), Kecamatan Purwakarta merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, sehingga berimplikasi langsung terhadap peningkatan produksi limbah domestik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil implementasi di lapangan, yang memerlukan kajian lebih mendalam dari perspektif implementasi kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Warwick sebagai grand theory. Warwick (2005) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Warwick (2005) menekankan bahwa pembagian potensi yang proporsional akan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tentang pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan IPAL komunal di Kecamatan Purwakarta dengan menggunakan perspektif Teori Implementasi Kebijakan Warwick. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tentang pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan Instalansi Pengelohan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan Purwakarta. Subjek penelitian meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Kecamatan Purwakarta, dan masyarakat Kecamatan Purwakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, serta dokumentasi berupa arsip resmi, laporan kegiatan, dan data sekunder dari literatur maupun media daring. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tentang pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan Instalansi Pengelohan Air Limbah (IPAL) Komunal.

PEMBAHASAN

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Barat yang mengalami dinamika pembangunan cukup pesat, ditandai dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Posisi geografis Purwakarta yang berada pada jalur penghubung antarwilayah menjadikannya sebagai kawasan penyangga aktivitas perkotaan dan industri, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan layanan dasar, khususnya di bidang sanitasi dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perkembangan kawasan permukiman yang tidak selalu diiringi dengan ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai berimplikasi pada meningkatnya volume air limbah domestik yang dihasilkan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan, terutama kualitas air permukaan dan kesehatan masyarakat. Di beberapa

wilayah, termasuk Kecamatan Purwakarta sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan kepadatan penduduk tertinggi, pengelolaan limbah domestik masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menetapkan kebijakan pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi sanitasi berbasis kawasan yang efektif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan yang ada. Kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan air limbah domestik tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik pembangunan infrastruktur, tetapi juga erat kaitannya dengan kapasitas organisasi, efektivitas komunikasi kebijakan, dukungan pemangku kepentingan, serta pembagian peran antaraktor kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan, karena pada tahap inilah suatu kebijakan diuji efektivitasnya dalam menjawab permasalahan publik. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan hidup masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, melainkan juga oleh kemampuan aktor pelaksana dan penerimaan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Pembahasan ini menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tentang pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Purwakarta dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Warwick. Analisis difokuskan pada empat dimensi utama, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi, yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Kemampuan organisasi merupakan dimensi fundamental dalam implementasi kebijakan, karena berkaitan langsung dengan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan. Warwick menegaskan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat berjalan efektif apabila organisasi pelaksana memiliki kemampuan teknis, kemampuan koordinatif, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Purwakarta belum sepenuhnya optimal. Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta telah memiliki kewenangan dan struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan limbah domestik, termasuk pembangunan IPAL komunal. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang sanitasi lingkungan menjadi hambatan utama. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pembangunan IPAL komunal serta terbatasnya pengawasan dan pemeliharaan sarana yang telah dibangun.

Selain itu, kemampuan organisasi dalam menjalin hubungan antarorganisasi juga masih lemah. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya belum berjalan secara terstruktur. Hal ini terlihat dari belum meratanya pembangunan IPAL komunal di seluruh desa, meskipun tingkat kepadatan penduduk dan potensi pencemaran relatif tinggi. Lemahnya koordinasi antarorganisasi menyebabkan kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif tidak sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dari sisi SOP, pemerintah daerah telah memiliki regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, namun dalam praktiknya SOP tersebut belum dijalankan secara konsisten. Ketidaktegasan mekanisme kerja dan lemahnya pengawasan internal mengindikasikan bahwa kemampuan organisasi masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dimensi informasi dalam Teori Warwick menekankan pentingnya komunikasi kebijakan, baik antar pelaksana kebijakan maupun antara pemerintah dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan mempengaruhi tingkat penerimaan

serta kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek informasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Purwakarta masih belum optimal. Sosialisasi kebijakan mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme penggunaan IPAL komunal belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memahami fungsi IPAL komunal sebagai sarana pengelolaan limbah yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas lingkungan.

Kurangnya informasi juga terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan IPAL komunal. Masyarakat cenderung memandang IPAL sebagai proyek pemerintah semata, bukan sebagai fasilitas publik yang membutuhkan keterlibatan bersama. Hal ini memperkuat temuan bahwa informasi kebijakan belum diterima secara efektif oleh masyarakat sebagai objek kebijakan. Selain itu, alur komunikasi antarinstansi pelaksana juga belum berjalan secara optimal. Informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan IPAL komunal belum terdistribusi secara merata antarorganisasi, sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan program dan ketidaksinkronan kebijakan di tingkat lapangan.

Dukungan merupakan dimensi penting yang menentukan keberlanjutan implementasi kebijakan. Warwick memandang dukungan sebagai bentuk komitmen dari aktor kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam menerima dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pengelolaan air limbah domestik secara normatif sudah cukup kuat, yang ditunjukkan melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 serta pengalokasian anggaran untuk pembangunan IPAL komunal. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan komitmen operasional yang konsisten, khususnya dalam hal pengawasan, evaluasi, dan penguatan kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat bawah.

Di sisi lain, dukungan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi pengelolaan limbah domestik serta manfaat jangka panjang IPAL komunal.

Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya diterima sebagai kebutuhan bersama, melainkan masih dipandang sebagai kewajiban pemerintah semata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Warwick bahwa rendahnya dukungan publik akan menghambat implementasi kebijakan, terutama ketika kebijakan tersebut menuntut perubahan perilaku masyarakat. Tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat, pembangunan IPAL komunal berpotensi tidak berkelanjutan dan kurang berdampak signifikan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan.

Pembagian potensi dalam Teori Warwick berkaitan dengan distribusi kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antaraktor kebijakan. Pembagian potensi yang tidak jelas akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian potensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Purwakarta belum berjalan secara proporsional. Kewenangan antara pemerintah daerah, instansi teknis, kecamatan, dan desa belum dibagi secara tegas, sehingga pelaksanaan kebijakan sering kali mengalami kebingungan di tingkat lapangan. Kondisi ini berdampak pada tidak sinkronnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IPAL komunal.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah dan kompetensi staf pelaksana kebijakan masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Purwakarta. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan dan pemeliharaan IPAL komunal tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan IPAL komunal juga menghambat partisipasi aktif desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dengan demikian, pembagian potensi yang belum jelas dan belum seimbang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Purwakarta belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan keempat dimensi Teori Implementasi Kebijakan Warwick, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik

melalui pembangunan IPAL komunal di Kecamatan Purwakarta belum berjalan optimal. Kelemahan kemampuan organisasi, kurangnya informasi, rendahnya dukungan masyarakat, serta belum jelasnya pembagian potensi antaraktor kebijakan saling berkaitan dan memperkuat hambatan implementasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, komunikasi kebijakan yang efektif, dukungan publik, serta pembagian peran yang jelas dan proporsional. Oleh karena itu, penguatan keempat dimensi tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan di Kecamatan Purwakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Warwick, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Purwakarta belum berjalan optimal. Pada dimensi kemampuan organisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Dimensi informasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga pemahaman serta partisipasi masyarakat masih rendah. Pada dimensi dukungan, meskipun pemerintah daerah telah memiliki komitmen normatif melalui regulasi dan penganggaran, dukungan operasional dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Sementara itu, pada dimensi pembagian potensi, ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antaraktor kebijakan menghambat efektivitas implementasi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan pengelolaan air limbah domestik memerlukan penguatan kapasitas organisasi, komunikasi kebijakan yang efektif, dukungan berkelanjutan, serta pembagian peran yang jelas dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John w. 2016. *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Environmental Governance Group. (2023). *Environmental Governance in Indonesia*. Cham: Springer Nature.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Impelentasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*.
- Kasmad, Rulinawaty. 2012. *Studi Impelentasi Kebijakan Publik*.
- Kholif, Muhammad Al. 2020. "Pengelolaan Air Limbah Domestik."
- Mulia, Gelora Jelang Takbira. 2015. "Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Di Kabupaten Gresik."
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Vol. 51.
- Sugiyono. 2012. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALPABETA, CV.
- Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Pendidikan. Bandung." *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* 308.
- Syafiie, Inu kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*.
- Wulan, P., Sukweenadhi, J., Sulistyaningsih, E., Utami, M. R., & Adami, A. (2023). *Ekologi dan Lingkungan*. Malang: Eureka Media Aksara.

Jurnal dan Artikel

Aviandani, Kiki. 2022. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Malang). Malang. Universitas Islam Malang.

Nazar, Futiha, Sutarto Mochtar, Ely Sufianti, Endang Wirjatmitri lestari, and Edah Jubaedah. 2021. "Analisis Impelentasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 12(2): 163–70.

Sunarya, A. (2024). Climate and environmental policy in Indonesia: Challenges and opportunities. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 195–206.

Website

Badan Pusat Statistik. 2021. "Sensus Penduduk 2020." *Bps.Go.Id* (27):1–52.

Narwasisinfo.com (2016). Pembuatan Ipal Komunal Kabupaten Purwakarta <https://portal.narwasis.info>

Regulasi

- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Limbah Domestik.